

**KOLABORASI STAKEHOLDER
DALAM AKTIVITAS KEBUDAYAAN
DI DESA PALEMBAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

FRANS SALSA ROMANDO
NPM 1916011031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**KOLABORASI STAKEHOLDERS
DALAM AKTIVITAS KEBUDAYAAN
DI DESA PALEMBAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

FRANS SALSA ROMANDO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM AKTIVITAS KEBUDAYAAN DI DESA PALEMBAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

oleh

FRANS SALSA ROMANDO

Kolaborasi *stakeholder* merupakan proses interaksi multi-aktor yang mengintegrasikan peran, tanggung jawab, dan sumber daya demi mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diraih secara independen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis gambaran kolaborasi antara masyarakat desa, pemerintah desa, dan akademisi dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang, Kabupaten Lampung Selatan. Lampung memiliki Desa Palembang dengan keunggulan Sumber Daya Budaya yang konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis gambaran kolaborasi antar *stakeholder* (masyarakat desa, pemerintah desa, dan akademisi) dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya sinergitas multipihak dalam melestarikan kearifan lokal sekaligus mendorong potensi pariwisata budaya di tingkat pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kolaborasi antar *stakeholder* dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang telah terlaksana dengan kategori baik. Seluruh dimensi pengukuran memperoleh penilaian yang positif dari responden, sehingga mendukung efektivitas upaya pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus memperkuat relevansi teori *stakeholder* Freeman dalam konteks pembangunan berbasis nilai lokal.

Kata Kunci: kolaborasi, stakeholder, kebudayaan, pengembangan, desa Palembang, pariwisata.

ABSTRACT

STAKEHOLDER COLLABORATION IN CULTURAL ACTIVITIES IN PALEMBAPANG VILLAGE, SOUTH LAMPUNG REGENCY

by

FRANS SALSA ROMANDO

Stakeholder collaboration is a multi-actor interaction process that integrates roles, responsibilities, and resources to achieve shared goals that cannot be attained independently. This study aims to identify, describe, and analyze the pattern of collaboration among village communities, the village government, and academics in cultural activities in Palembang Village, South Lampung Regency. Palembang Village, located in Lampung Province, possesses a distinctive and consistently preserved cultural resource potential. The study focuses on examining the collaboration among stakeholders—namely the village community, village government, and academics—in carrying out cultural activities within the village. The background of this research is based on the importance of multi-stakeholder synergy in preserving local wisdom while simultaneously promoting cultural tourism potential at the rural level.

The results indicate that, overall, stakeholder collaboration in cultural activities in Palembang Village has been implemented effectively and falls within the good category. All measurement dimensions received positive evaluations from respondents, thereby supporting the effectiveness of sustainable local cultural preservation efforts. These findings also reinforce the relevance of Freeman's stakeholder theory in the context of local value-based development.

Keywords: collaboration, stakeholders, culture, development, Palembang village, tourism..

Judul Skripsi : **KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM
AKTIVITAS KEBUDAYAAN DI DESA
PALEMBAPANG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Frans Salsa Romando**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011031**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

M. Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 19861129 201903 1 007

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bartoven', is positioned above the name and NIP of the Dean of the Sociology Department.

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **M. Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, B. Lampung 35145
Website: <http://sosiologi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Frans Salsa Romando

NPM 1916011031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Frans Salsa Romando yang dilahirkan di Tanjung Karang, 11 Desember 1999, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Medya Novhatra dan ibu Jumiati Sebagian besar waktu tinggal di Bandar Lampung sejak dilahirkan hingga dinyatakan lulus sebagai sarjana.

Adapun riwayat pendidikan formal penulis tempuh dengan beberapa jenjang, yakni:

1. SDN 3 Perumnas Way Kandis namun diselesaikan di SDN 5 Sumber Rejo pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018

Di tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan memenangkan program PPK Ormawa sebagai penulis utama dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi poin 3. Pada tahun 2021, penulis menjadi bagian Pejuang Muda yang merupakan program pengabdian oleh kementerian sosial . Pada Tahun 2022, penulis melakukan magang di Travelxism, PT. Gemilang Media Wisata. Kemudian di tahun yang sama pada periode selanjutnya, penulis kembali melakukan magang di program MDDR (Magang di Rumah Rakyat) oleh DPR RI.

MOTTO

“Tidak ada satu hal pun yang dibiarkan Allah terjadi dan itu sia-sia.”
(Q.S Al-Imran: 191)

“Seburuk apa pun kita, senakal apa pun kita, tetaplah jaga shalat”
(Pak Jun di Gisting, 2021)

*“Tidak ada cara yang lebih baik dalam menjalani hidup selain
dengan menganggap Ibu segala-galanya”*
(Frans Salsa Romando)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang kepada:

Kedua Orang Tua

Ibu Jumiati dan Bapak Medya Nouhatra

Yang telah memberikan pengorbanan dan doa-doanya yang selalu mengiringi langkah penulis pada setiap prosesnya.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang tidak ternilai harganya dengan kesabaran dan ketulusan.

Almamaterku

Sosiologi, Universitas Lampung.

SANWANCANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kolaborasi Stakeholders dalam Aktivitas Kebudayaan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan” yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan serangkaian proses pendidikan serta penyusunan skripsi ini..
2. Kedua orangtua, Ibu Jumiati dan Bapak Medya Novhatra yang doa-doanya mengiringi saya selama berproses sampai saat ini.
3. Adikku, Nadya yang telah memberikan semangat, motivasi, dan hiburan saya dalam mencapai gelar sarjana sosiologi..
4. Tante Yati yang telah turut serta membantuku dalam berbagai hal dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yuni, yang diluar dugaan sangat amat berhati baik dan dalam proses pencapaian gelar sarjana ini.
6. Rektor, Wakil Rektor, dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dr. Bartoven Vivit, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
9. Bapak Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak

yang telah sabar, pengertian dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini menjadi lebih baik.

10. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si., selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih banyak bapak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik.
11. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
12. Staff administrasi Jurusan Sosiologi Universitas Lampung, Mas Edy dan Bapak Daman terima kasih telah banyak membantu melayani segala keperluan administrasi.
13. Teruntuk Nopal, Caca, Don, Sule, Hafiz yang telah membantu memberikan berbagai informasi terkait penyelesaian skripsi ini, semoga segala sesuatu yang baik kembali kepada kalian.
14. Dan terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang telah berhasil sampai di titik ini, memilih untuk menyelesaikan tanggung jawabnya meskipun jalannya cukup terjal. Semoga kedepannya diri ini bisa membawakan senyum kebahagiaan untuk orang tua dan orang terdekat dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Semoga suatu saat nanti Frans Salsa Romando bisa mengimplementasikan ilmunya untuk bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan, tata bahasa, tata penulisan serta tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan dalam prosesnya. Dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026

Frans Salsa Romando

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Kolaborasi	8
2.2 Stakeholder.....	11
2.2.1 Masyarakat Desa.....	11
2.2.2 Pemerintah Desa	13
2.2.3 Akademisi.....	15
2.3 Kolaborasi Stakeholder	16
2.4 Aktivitas Kebudayaan.....	17
2.5 Landasan Teori Stakeholder Edward Freeman.....	20
2.6 Penelitian Terdahulu	23
2.7 Kerangka Penelitian.....	27
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Subjek Penelitian	32
3.3.1 Populasi Penelitian.....	32
3.3.2 Sampel Penelitian	32
3.4 Sumber Data.....	33
3.4.1 Data Primer.....	33

3.4.2	Data Sekunder.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6	Instrumen Penelitian	34
3.6.1	Skala <i>Likert</i>	35
3.6.2	Definisi Konseptual	35
3.6.3	Definisi Operasional	37
3.7	Teknik Keabsahan Data	38
3.7.1	Uji Validitas.....	39
3.7.2	Uji Reliabilitas	40
3.8	Teknik Analisis Data.....	40
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	41
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1	Hasil Penelitian.....	47
5.1.1	Analisis Deskriptif Data Responden	47
5.1.2	Analisis Uji Kualitas Data	50
5.1.2.1	Hasil Uji Validitas	50
5.1.2.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	52
5.1.3	Analisis Deskriptif Variabel	53
Analisis Deskriptif Variabel Kolaborasi Stakeholder	53	
5.2	Pembahasan.....	61
5.2.1	Partisipasi Stakeholder dalam Aktivitas Kebudayaan.....	61
5.2.2	Komunikasi dan Koordinasi Antar Stakeholder	62
5.2.3	Transparansi Antar Stakeholder.....	63
5.2.4	Kepercayaan Antar Stakeholder	65
5.2.5	Apresiasi Antar Stakeholder.....	66
5.2.6	Sintesis Hasil Penelitian dengan Teori Stakeholder Freeman	66
VI.	PENUTUP	68
6.1	Kesimpulan.....	68
6.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Proses Kolaborasi Ring dan Van de Ven (1994).....	10
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Kolaborasi Stakeholder	29
Gambar 3.1 Rumus Uji Validitas.....	39
Gambar 3.2 Rumus Uji Reliabilitas	40
Gambar 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Gambar 5.2 Responden Berdasarkan Usia	49
Gambar 5.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Gambar 5.4 Garis Kontinium Sub-variabel Partisipasi	55
Gambar 5.5 Garis Kontinium Sub-variabel Komunikasi & Koordinasi.....	57
Gambar 5.6 Garis Kontinium Sub-variabel Transparansi	58
Gambar 5.7 Garis Kontinium Sub-variabel Kepercayaan	59
Gambar 5.8 Garis Kontinium Sub-variabel Apresiasi.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Skala Likert	35
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Indikator Penelitian	37
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 5.4 Uji Validitas Dimensi Partisipasi	50
Tabel 5.5 Uji Validitas Dimensi Komunikasi & Koordinasi	50
Tabel 5.6 Uji Validitas Dimensi Transparansi	51
Tabel 5.7 Uji Validitas Dimensi Kepercayaan	51
Tabel 5.8 Uji Validitas Dimensi Apresiasi	51
Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel	52
Tabel 5.10 Distribusi Data Mengenai Partisipasi Tiap Stakeholder	54
Tabel 5.11 Distribusi Data Mengenai Komunikasi & Koordinasi antar Stakeholder	55
Tabel 5.12 Distribusi Data Mengenai Transparansi antar Stakeholder	57
Tabel 5.13 Distribusi Data Mengenai Kepercayaan antar Stakeholder	58
Tabel 5.14 Distribusi Data Mengenai Apresiasi antar Stakeholder	60
Tabel 5.15 <i>Highlight</i> Skor Rendah Data Komunikasi & Koordinasi	63
Tabel 5.16 <i>Highlight</i> Skor Rendah Data Mengenai Transparansi	65
Tabel 5.17 <i>Highlight</i> Skor Rendah Data Mengenai Kepercayaan	66

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin sebuah negara dikategorikan berkembang, akan semakin tinggi tuntutan terhadap pemerintah untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta meminimalisasi kendala yang ada. Tidak sampai disitu, pencegahan untuk masalah di kemudian hari juga perlu diperhatikan. Dalam hal sumber daya, negara Indonesia sebagai negara kepulauan tentu memiliki kekayaan potensi wisata budaya pada tiap daerahnya (Sapto & Mutmainah, 2020). Sebagai sebuah sumber daya, budaya termasuk dalam salah satu elemen yang berpotensi yang untuk dikembangkan menjadi sebuah pariwisata.

Pariwisata budaya berperan penting dalam pelestarian kebudayaan lokal dan juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Putra dkk, 2022). Kendati demikian, kondisi tersebut tidak serta merta memberikan dampak positif yang jelas bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini terepresentasi secara kasat mata dari situasi finansial masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata, khususnya pariwisata yang terletak di daerah pedesaan.

Masyarakat pedesaan masih digandrungi dengan lemahnya kelembagaan dan minimnya kepemilikan lahan. Di sisi yang sama, secara struktural, masyarakat desa juga masih minim dalam menerima akses pendidikan, kesehatan, globalisasi, hingga akses dalam memperoleh pekerjaan (Surahman & Fajar, 2018). Keseluruhan keterbatasan wilayah pedesaan tersebut tentu berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan. Namun,

terdapat beragam potensi desa yang bernilai dan tidak ditemukan pada wilayah perkotaan.

Berbicara terkait potensi fisik misalkan, lingkungan geografis pedesaan lebih alamiah dan kental dengan masih terjaganya sumber daya alam (Soleh, 2017). Sementara pada potensi non fisik, masyarakat desa cenderung familisme atau memiliki keakraban yang erat antar individu sehingga dalam banyak kegiatan mereka lebih mementingkan kegiatan sosial dibanding kegiatan ekonomi (Murdiyanto, 2008). Dalam jalannya kehidupan, mereka juga masih memegang teguh nilai budaya dan adat istiadat secara turun temurun dari para leluhur (Desky, 2022).

Kentalnya nilai budaya dan adat istiadat menjadi salah satu potensi yang dapat dijadikan strategi dalam melakukan pembangunan desa. Dengan memanfaatkan strategi tersebut, diharapkan dapat memberikan diversifikasi mata pencaharian masyarakat desa sehingga mereka tidak berpaku pada sektor pertanian atau kelautan yang penghasilannya bergantung pada kondisi cuaca (Yahya & Eka, 2022). Strategi pembangunan desa dengan memanfaatkan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ialah seperti melakukan pengembangan pariwisata budaya.

Pariwisata budaya perlu dilestarikan agar mampu menjaga kearifan lokal di tengah derasnya kemajuan teknologi (Choirunnisa & Rahman, 2021). Pariwisata budaya dapat dimanfaatkan sebagai objek sekaligus daya tarik dalam menggaet para wisatawan (Sugiyarto & Amaruli, 2018). Upaya yang dapat dilakukan antara lain seperti melalui museum peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan adat, hingga kerajinan yang dihasilkan oleh suku tertentu (Wirawan & Semara, 2021).

Wisatawan yang datang tidak hanya ingin melihat keindahan alam suatu wilayah, tetapi lebih dari itu. Banyak wisatawan datang ke suatu daerah untuk mempelajari kehidupan lokal, menonton atraksi budaya, mendapatkan pengalaman, hingga memperkaya kemampuan mereka

(Nugroho & Nurchayati, 2022). Pariwisata budaya akhirnya dipandang sebagai suatu komoditas karena berperan penting dalam menarik minat wisatawan dan membuat mereka tinggal lebih lama di suatu daerah (Simanjuntak & Tanjung, 2017). Kondisi ini pada akhirnya membuka keran perputaran ekonomi pada suatu wilayah dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka mengembangkan pariwisata budaya, diperlukan strategi yang menyeluruh dan mengintegrasikan pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, hingga akademisi (Nugroho & Nurchayati, 2022). Melalui hubungan yang komunal, para pemangku kepentingan dapat membangun kepentingan bersama terhadap aset budaya (Hudiyanto & Lutfi, 2021). Para stakeholder perlu bekerjasama dan berperan sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuannya tersebut.

Peran masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat lokal lebih banyak mengambil bagian dalam pelestarian budaya nenek moyangnya. Keberhasilan suatu pengembangan pariwisata budaya amat memerlukan dukungan dari masyarakat lokal (Dewi & Fandelin, 2013). Untuk itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh jalannya pembangunan (*bottom-up*). Di sisi lain, pelibatan ini bermanfaat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat memiliki keterampilan baru yang juga berguna bagi ekonomi rumah tangga. Dalam rangka mendorong hal tersebut, kehadiran pemerintah desa memainkan peran penting.

Peran pemerintah desa dalam wisata budaya antara lain sebagai regulator yang merumuskan arah pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Pemerintah desa juga berperan sebagai stimulator, yakni sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar yang berkontribusi untuk memperkenalkan potensi wilayahnya ke khalayak luar (Arifin, 2017). Di sisi lain, pemerintah desa juga memiliki *power* untuk melakukan perbaikan infrastuktur seperti jalan

dan jembatan, hal ini penting dalam rangka membuka akses agar mudah dijamah dan memudahkan wisatawan (Hidayat, 2020).

Peran pemerintah desa sebagai perumus arah pembangunan sebaiknya dilandaskan atas kesepakatan dengan masyarakat serta berpedoman pada naskah akademik (Nugroho & Nurchayati, 2022). Untuk itu, kehadiran seorang akademisi diperlukan untuk mengisi celah ini. Masalah utama kurang efektifnya suatu kebijakan ialah karena tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, seperti riset mendalam mengenai konteks lokal (Dunn, 2016). Suatu kebijakan juga mesti dimonitoring dan dievaluasi secara *sustainable*, guna memastikan implementasinya selaras dengan tujuan dan memungkinkan untuk melakukan perbaikan apabila diperlukan (Patton & Jennifer, 2016).

Melihat berbagai peran dan tupoksi masyarakat desa, pemerintah desa, hingga akademisi di atas. Peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian guna melihat bagaimana efektivitas kolaborasi stakeholder terhadap pengembangan pariwisata budaya di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan. Desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian ialah karena desa ini penuh dengan potensi wisata budaya dan telah disorot oleh media lokal hingga nasional. Di Desa Palembang masyarakatnya memiliki kreativitas dengan membuat kerajinan lokal karya seni anyaman seperti topi yang dibuat dari daun kelapa yang memiliki nilai seni (IDN Times, 2021). Di sisi lain, terdapat sanggar seni bernama 'sanggar sai buay' yang bergerak untuk melestarikan budaya lokal (Radar Lamsel, 2019).

Dalam ranah akademik, terdapat penelitian yang menemukan masyarakat Desa Palembang memiliki kerajinan tangan berupa topeng tuping dan berbagai produk lain berupa aksesoris cui, cincin, hingga produk rumah tangga yang berbahan dasar batok kelapa (Syahrial, 2022; Hamni & Ulya, 2022). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan kentalnya nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Desa Palembang. Bahkan, desa ini pernah menjadi salah satu lokasi pengabdian masyarakat dari organisasi

kemahasiswaan HMJ Sosiologi Universitas Lampung pada tahun 2023 (Lampung Post, 2023).

Berbagai informasi di atas memperlihatkan sinergitas stakeholder seperti masyarakat desa, pemerintah desa, hingga akademisi dalam rangka menjaga kelestarian budaya. Untuk itu, peneliti ingin melihat bagaimana efektivitas kolaborasi stakeholder tersebut terhadap pengembangan pariwisata budaya di Desa Palembang. Dalam ranah ilmu pengetahuan sendiri, terdapat berbagai penelitian yang memiliki relevansi dengan judul yang ingin peneliti angkat. Penelitian-penelitian tersebut sengaja peneliti kumpulkan dan analisis untuk menentukan dimana posisi peneliti dalam rangka memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan.

Pengembangan potensi wisata berbasis kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun desa dan merupakan investasi jangka panjang dan potensial bagi pemerintah (Sinulingga, et al., 2022). Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengembangan desa pariwisata budaya antara lain sikap masyarakat, SDM minim, akomodasi wisata, kolaborasi stakeholder, hingga lemahnya akses promosi (Priyanto, 2016; Andriyani & Muhamad, 2017; Rahmatillah & Hirsan, 2019; Kedasi Silayar & Mulyati, 2021). Untuk itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan.

Proses pemberdayaan dapat meliputi 3 tahapan, yaitu tahap membentuk iklim masyarakat berkembang, tahap memperkuat potensi dan komunitas, serta tahap pendampingan kelompok (Widyaningsih, 2019). Salah satu metode yang dapat digunakan ialah seperti model *penthahelix* untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata budaya lokal (Eprilianto, et al., 2023). Peningkatan pengetahuan dan kesatuan pemahaman antara stakeholder benar-benar dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata budaya (Destiana & Yuningsih, 2020; Sadad, et al., 2023; Astiana & Kemala, 2023).

Berdasar pada rangkaian penelitian terdahulu di atas, peneliti menempatkan posisi dalam penelitian ini dalam rangka memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Pada penelitian terdahulu dijelaskan pentingnya kolaborasi stakeholder dalam pengembangan wisata budaya. Untuk itu, dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana kolaborasi tersebut dengan lokasi spesifik sehingga lebih praktis dan terfokus pada implementasi kolaborasi di lapangan serta efektivitasnya dalam pengembangan pariwisata budaya di tingkat lokal. Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan merupakan lokasi spesifik dan belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini lebih mendalam pada satu konteks lokal tertentu.

Menelaah dalam aspek akademis, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teori stakeholder oleh R. Edward Freeman. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana setiap aktor memiliki kepentingan serta pengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Dengan fokus pada kepentingan (*interest*), pengaruh (*power*), dan peran (*role*), teori ini membantu mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat dengan membawa peran, kepentingan serta pengaruh, baik yang bersifat individual aktor maupun yang bersifat kolaboratif.

Melihat seluruh rangkaian latar belakang di atas, peneliti merasa penelitian ini amat penting untuk dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dalam aspek teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkhusus secara sosiologis. Sementara dalam aspek praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pemangku kebijakan dalam memahami konteks lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh rangkaian narasi dan argumentasi pada latar belakang yang tertuang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai

berikut: "Seberapa baik gambaran kolaborasi antar stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: "Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa seberapa baik gambaran kolaborasi antar stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan."

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai hubungan sosial pada aktivitas kebudayaan dalam konteks pembangunan pariwisata budaya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu sosiologi pariwisata dan studi pembangunan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan oleh pemerintah dan membantu komunitas lokal dalam merancang strategi yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini diharapkan menjadi penguatan bahwa pengembangan pariwisata budaya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mempertahankan dan menghormati nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mendorong partisipasi aktif dari semua stakeholder.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kolaborasi

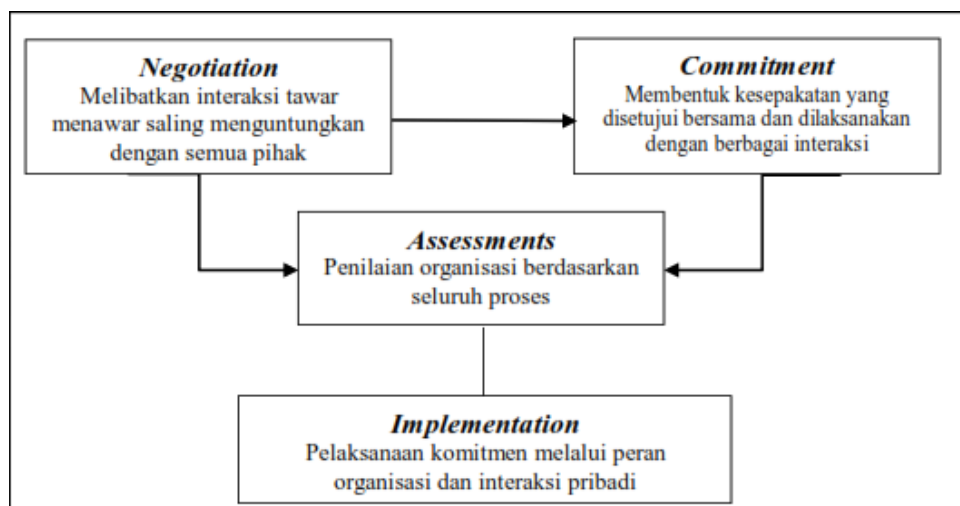
Kolaborasi merupakan salah satu bentuk kemitraan (*partnership*) (Djamaludin, 2017) yang ditandai oleh adanya hubungan antarpihak yang melibatkan pembagian kewenangan, tanggung jawab pekerjaan, dukungan, serta manfaat yang diperoleh secara timbal balik. Dalam konteks kemitraan antarlembaga, Huxman dan Macdonald mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk hubungan yang dapat terjalin antarorganisasi.

1. Koordinasi, yaitu kondisi ketika organisasi tidak selalu melakukan interaksi secara langsung, tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aktivitas organisasi lain dalam proses perencanaan kegiatannya.
2. Kerja sama (*cooperation*), yang ditandai dengan adanya interaksi antarpihak untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan. Ketiga,
3. Kolaborasi (*collaboration*), yaitu hubungan yang lebih mendalam di mana organisasi bekerja bersama untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yang lebih luas (*meta mission*), sembari tetap menjalankan serta mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing organisasi (Djamaludin, 2017).

Konsep kolaborasi seringkali dikenal dengan istilah kerjasama. Secara konseptual, kolaborasi dapat dipahami sebagai hubungan kerja yang terjalin antaraktor, organisasi, atau institusi untuk mengintegrasikan sumber daya, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki guna mencapai

tujuan bersama yang berada di luar jangkauan kemampuan masing-masing pihak apabila bertindak secara independen. Agranoff dan McGuire menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses yang memfasilitasi terjalinnya kerja sama antarorganisasi guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas masing-masing pihak. Melalui mekanisme tersebut, organisasi dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang dimiliki, baik dalam aspek pengetahuan, sumber daya keuangan, waktu, maupun dalam menghadapi persaingan. Di sisi lain, Ostrom menekankan bahwa kolaborasi berkaitan dengan pembentukan struktur yang memberikan ruang bagi para aktor untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan dan menyelesaikan permasalahan secara kolektif melalui tindakan bersama (Sabaruddin, 2015).

Berdasarkan beberapa pengertian kolaborasi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan proses interaksi antara beberapa aktor, organisasi, maupun institusi dalam memberikan dukungan terhadap suatu kegiatan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Ring dan Van de Ven (1994) mengemukakan kerangka kerja dalam proses kolaborasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Proses Kolaborasi Ring dan Van de Ven (1994)
Sumber: Thomson dan Perry (dalam Sabaruddin, 2015, hal. 32)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kerangka kerja dalam proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ring dan Van de Ven terdiri dari empat phases. Pertama, Komitmen (*commitment*) yaitu kegiatan membentuk atau membuat kesepakatan mengenai kolaborasi yang telah disetujui bersama dan selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai interaksi. Kedua, negosiasi (*negotiation*) yang melibatkan interaksi tawar menawar saling menguntungkan dengan semua pihak yang berkolaborasi. Ketiga, yaitu penilaian (*assessments*) dari organisasi yang berkolaborasi berdasarkan seluruh proses kolaborasi yang telah dilaksanakan. Terakhir, yaitu implementasi (*implementation*) atau pelaksanaan komitmen yang telah diputuskan melalui peran organisasi dalam proses kolaborasi dan interaksi pribadi atau antar organisasi.

Proses kolaborasi menurut Huxham dan Siv Vangen yang dikutip Raharja (2008) terdiri dari enam hal diantaranya:

1. *Managing aims: Aims, goals* atau *obyektive* (tujuan) merupakan alasan utama terjadinya suatu kolaborasi (*why the collaboration exists and why they are party of it*). Terdapat tiga level tujuan dalam kolaborasi, yaitu (a) “*meta goals*” pada *top level*, yakni pernyataan eksplisit mengenai tujuan, (b) penjabaran kepentingan masing-masing organisasi yang terlibat, (c) penjabaran tujuan individu dari setiap organisasi.
2. *Compromise*: kompromi menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi perbedaan baik dari cara atau gaya kerja individu, kultur, norma dan nilai organisasi dengan cara menciptakan jalan tengah yang mengakomodasi dan menghilangkan prasangka terhadap pihak lain.
3. *Communication*: Komunikasi yang efektif dapat menghindari makna ganda atau kesalahpahaman serta memahami apa yang diinginkan pihak lain. Komunikasi disesuaikan dengan konteks, profesi, etnik dan bahasa resmi.
4. *Democracy and equality*: dalam kolaborasi ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu siapa yang terlibat, kesejajaran dan penghargaan

atas setiap orang, dan akuntabilitas atau bentuk tanggung jawab terhadap organisasi dan konstitusi.

5. *Power and Trust*: secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” dan menekan perasaan “tinggi hati”. Dalam kolaborasi, pemerintah menjadi aktor utama dan komunitas atau kelompok kecil menyumbangkan keahlian dalam wujud pengetahuan lokal.
6. *Determination, Commitment and Stamina*: dalam kolaborasi sering terjadi *collaborative inertia*, yaitu suatu situasi kolaborasi yang tak seimbang karena perbedaan pengalaman antara pihak satu dengan pihak lainnya sehingga tujuan kolaborasi menjadi sulit dicapai. Situasi ini diatasi dengan komitmen. Komitmen tersebut tergantung kesesuaian agenda mereka dengan program kolaborasi, manfaat keberlanjutan dan keteguhan hati (Sabaruddin, 2015).

2.2 Stakeholder

Stakeholder adalah individu atau sekelompok individu yang memiliki klaim atau perhatian atas sumber daya, hasil, atau dipengaruhi oleh hasil itu sendiri (Bryson, 2008). Secara umum, stakeholder didefinisikan sebagai pihak terkait yang memiliki perhatian atau pengaruh terhadap suatu obyek, antara lain seperti masalah, organisasi, kebijakan, program, pembangunan, dan lain sebagainya (Rahman & Prakoso, 2012). Dalam konteks penelitian ini, stakeholder yang dimaksud antara lain seperti masyarakat desa, pemerintah desa, hingga akademisi. Kajian pustaka dari masing-masing pihak terkait tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Masyarakat Desa

Masyarakat desa cenderung familisme atau memiliki keakraban erat antar individu sehingga dalam banyak kegiatan mereka lebih mementingkan kegiatan sosial dibanding kegiatan ekonomi (Murdiyanto, 2008). Masyarakat desa juga penuh dengan sikap hemat, kental kekeluargaan, dan menghormati orang lain, yang mana

hal tersebut cenderung sulit ditemukan di masyarakat perkotaan. Dalam aspek ikatan sosial yang kuat, hal ini membuat masyarakat desa penuh akan nilai gotong royong, tenggang rasa, hingga tolong menolong (Jamalludin, 2015).

Kehidupan masyarakat desa amat erat kaitannya dengan kearifan lokal budaya yang dianut secara turun temurun dari para leluhur (Siagian, 1974). Kearifan lokal ini antara lain seperti adat istiadat, tata krama, norma, bahasa, lembaga, hingga konstruksi rumah masyarakatnya (Jamalludin, 2015). Dalam jalannya kehidupan, masyarakat desa terbilang masih memegang teguh nilai budaya dan adat istiadat secara turun temurun dari para leluhur (Desky, 2022).

Ironinya, masyarakat pedesaan masih banyak yang menggantungkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari kondisi geografis sekitar. Masyarakat pesisir misalkan, mayoritas mereka memperoleh penghasilan dari potensi kelautan. Sementara masyarakat pegunungan, mayoritas bergantung pada potensi perkebunan dan pertanian. Situasi ini tentu membuat masyarakat pedesaan memperoleh penghasilan dengan bergantung pada kondisi cuaca sehingga membuat mereka terjatuh untuk tetap berada pada garis kemiskinan (Jamalludin, 2015).

Kearifan lokal merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Namun, masyarakat desa masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (Husein, 2021). Untuk itu, masyarakat desa perlu dilibatkan dalam jalannya pembangunan bersama pemerintah, khususnya pembangunan pariwisata budaya sebagai salah satu potensi yang dimiliki wilayah pedesaan (Syarifa & Wijaya, 2019). Pelibatan ini sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan guna memberikan penguatan kemampuan terhadap individu (Sapto & Mutmainah, 2020).

Wilayah pedesaan sebagai garda terdepan negara Indonesia perlu dikembangkan dalam kerangka ekonomi (Ulumiyah, 2013). Pembangunan wilayah pedesaan bertujuan agar wilayah pedesaan memiliki kesejahteraan dan kemandirian (Syarifudin & Ma'ruf, 2022). Untuk itu, masyarakat desa perlu bersinergi dengan pemerintah desa untuk menjalankan pemberdayaan sesuai potensi yang benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Oroh, 2014).

2.2.2 Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui struktur pemerintahan yang bertingkat dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Berbagai urusan pemerintahan didistribusikan dan dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan sesuai kewenangannya. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan dan memberikan pelayanan publik secara langsung, sehingga posisinya sering dikaitkan dengan konsep *street-level bureaucrats*. Pada tingkatan ini, seluruh urusan rakyat dikonsolidasi, dikomunikasi, hingga diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah desa bukan hanya mengurus administrasi warga, tetapi mencakup urusan informal seperti adat istiadat, agama, budaya, hingga hak usul masyarakat setempat (Achmad, 2018).

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sekaligus mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya. Pengaturan mengenai desa secara komprehensif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi dasar hukum terbaru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa desa memperoleh perhatian khusus dari

pemerintah sehingga senantiasa terjadi pembaruan dari segi regulasi (Rahyunir Rauf, 2015).

Undang-undang tersebut memberikan ruang kewenangan yang cukup besar kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, desa dipandang sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi sarana yang efektif untuk mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan kolektif masyarakat setempat. Untuk itu, pemerintah desa harus memajemen dan mengelola pemerintahan modern yang berbasis pada *local wisdom* (Achmad, 2018). Secara garis besar, ada 3 hal yang menjadi fokus modernisasi dan tata kelola dalam Undang-Undang terbaru, yakni pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepada desa, adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perimbangan keuangan sebagai hasil antar desa dengan kabupaten (Nasrin, et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa dijalankan oleh beberapa unsur, termasuk lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Lembaga pemerintah desa berperan dalam melaksanakan kebijakan desa, sementara BPD berfungsi dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan (Rahyunir Rauf, 2015). Berdasarkan peran tersebut, lembaga pemerintah desa dianggap sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa, sedangkan BPD dianggap sebagai lembaga perwakilan desa atau legislatif (Effendy, 2010). Lembaga pemerintah desa mencakup pimpinan seperti Kepala Desa, serta pejabat pendukung Kepala Desa, termasuk Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sementara struktur BPD, terdiri dari anggota yang merupakan wakil penduduk desa sesuai dengan keterwakilan desa (Nurcholis, 2011).

Berbicara dalam konteks aktivitas kebudayaan di desa, pemerintah desa memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program, hingga sebagai pembina (Sahyana, 2019). Pemerintah desa

juga berperan dalam memberdayakan masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya, tanggung jawab ini diemban untuk membawa masyarakat desa ke taraf hidup yang lebih baik lagi (Syarifudin & Ma'ruf, 2022). Untuk itu, pemerintah desa perlu bersinergi bersama masyarakat dan juga akademisi dalam merumuskan strategi pembangunan wilayah pedesaan yang tepat dan selaras dengan potensi sumber daya sebagai kearifan satu daerah (Ulumiyah, 2013).

2.2.3 Akademisi

Ketiga butir Tridharma perguruan tinggi secara tegas menyebutkan peran akademisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Butir kedua mengharuskan akademisi melakukan penelitian yang menghasilkan temuan-temuan inovatif dan kreatif untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis (Murniati, 2009). Akademisi sebagai pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam melakukan penelitian yang menghasilkan ide atau strategi untuk pengembangan destinasi wisata (Talib, 2020).

Dalam aktivitas kebudayaan, akademisi berperan penting dalam membentuk masyarakat yang berbasis pengetahuan (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Tugas akademisi adalah membangun masyarakat yang memiliki keterampilan dan dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi. Selain itu, akademisi juga berfungsi untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berpikir kritis, mengasah kemampuan, serta menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (Halibas & Sibayan, 2017).

Peran akademisi di tengah masyarakat memiliki nilai penting dalam memperkuat posisi tawar menawar masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran akademisi diharapkan mampu melindungi masyarakat dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan

rakyat. Bentuk nyata peran akademisi dalam memberdayakan masyarakat antara lain sebagai pemberi ide, menjadi pendamping masyarakat, serta bertindak sebagai "advokat" untuk berbagai kepentingan masyarakat (Solichah & Merita, 2023).

2.3 Kolaborasi Stakeholder

Kolaborasi stakeholder dapat dipahami sebagai bentuk interaksi multi-aktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan pihak lainnya dalam suatu sistem yang saling terhubung. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi melalui pembagian peran, tanggung jawab, serta pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama (Musleh & Lubis, 2024). Kolaborasi stakeholder juga erat kaitannya dengan konsep collaborative governance, yaitu suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor secara kolektif. Keberhasilan kolaborasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti adanya tujuan bersama (*shared goals*), kepercayaan antar pihak (*mutual trust*), pemahaman bersama (*mutual understanding*), serta komitmen dalam menjalankan peran masing-masing (Abdillah, 2024). Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, kolaborasi cenderung tidak berjalan efektif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam praktiknya, kolaborasi *stakeholder* menuntut adanya kejelasan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran serta kurangnya kesamaan persepsi antar stakeholder dapat menghambat efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang baik, transparansi, serta pengaturan hak dan kewajiban yang jelas agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal. Kolaborasi *stakeholder* dalam aktivitas kebudayaan mampu meningkatkan efektivitas pelestarian budaya serta mendorong inovasi berbasis kearifan lokal. Misalnya, penelitian oleh Pratama dan Putri (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antara

pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi dapat memperkuat keberlanjutan kegiatan budaya melalui integrasi pengetahuan lokal dan pendekatan ilmiah. Selain itu, studi oleh Sari et al. (2023) menegaskan bahwa keterlibatan multi-aktor dalam pengelolaan budaya dapat meningkatkan nilai ekonomi budaya melalui pengembangan desa wisata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan merupakan proses kerja sama multi-aktor yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya secara berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi ini sangat ditentukan oleh partisipasi, komunikasi dan koordinasi, kepercayaan, dan apresiasi antar *stakeholder*.

2.4 Aktivitas Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses belajar. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa kebudayaan memiliki tiga wujud utama, yaitu ide atau gagasan, aktivitas, dan artefak. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama terletak pada wujud aktivitas, yaitu tindakan nyata masyarakat dalam menjalankan budaya.

Dalam kehidupan masyarakat desa seperti Desa Palembang, kebudayaan tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz (1973) bahwa kebudayaan merupakan sistem makna yang diwariskan secara simbolik dan menjadi dasar dalam bertindak.

Sementara itu, aktivitas kebudayaan adalah segala bentuk tindakan atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Sedyawati (2010) menjelaskan bahwa aktivitas kebudayaan mencakup kegiatan seperti upacara adat, kesenian tradisional, hingga praktik sosial berbasis budaya.

Dalam konteks Desa Palembang, aktivitas kebudayaan dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat seperti pelaksanaan tradisi lokal, kegiatan keagamaan, kesenian daerah, serta praktik gotong royong. Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat. Menurut Linton (1936), aktivitas kebudayaan merupakan bagian dari perilaku budaya (*cultural behavior*) yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, keberlangsungan aktivitas kebudayaan di Desa Palembang sangat bergantung pada proses pewarisan nilai budaya antar generasi.

Di Desa Palembang (Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan), kebudayaan yang berkembang cukup beragam dan masih kental dengan adat Lampung. Dari beberapa sumber, kebudayaan di Desa Palembang bisa dikelompokkan menjadi beberapa bentuk berikut:

- a. Kebudayaan Khas Desa Palembang
 - 1) Topping, salah satu budaya lokal berupa pertunjukan topeng yang cukup khas dan bernilai sakral di Palembang
 - 2) Anyaman daun kelapa berupa topi tradisional
 - 3) Tukkus, yaitu peci tapis khas Lampung sebagai simbol budaya lokal
- b. Kesenian Tradisional Lampung
 - 1) Tari Bedana, tarian tradisional khas Lampung yang sering ditampilkan dalam acara desa.
 - 2) Musik gambus tunggal, musik tradisional bernuansa Islami yang menjadi ciri khas budaya Lampung.
 - 3) Pencak silat, seni bela diri tradisional yang juga dipentaskan sebagai atraksi budaya.
- c. Tradisi dan Ritual Keagamaan Lokal
 - 1) Niyuh Syawal, tradisi pasca Idulfitri (sekitar 5 Syawal) yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus pertunjukan budaya.

- 2) Pawai bedug dan kegiatan Ramadan (Manah, dll.), tradisi keagamaan yang sudah menjadi budaya masyarakat setempat.

Durkheim (1912) dalam *The Elementary Forms of Religious Life* lebih menekankan bahwa budaya menciptakan “*collective consciousness*” (kesadaran kolektif) dan aktivitas budaya (terutama ritual) berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan kohesi kelompok. Sementara menurut Koentjaraningrat (2009), aktivitas kebudayaan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai identitas sosial, sarana integrasi sosial, media edukasi, dan sarana adaptasi budaya.

Dalam era globalisasi, aktivitas kebudayaan di Desa Palembang juga menghadapi tantangan berupa perubahan sosial dan budaya. Masuknya teknologi dan budaya luar dapat memengaruhi pola aktivitas masyarakat (Appadurai, 1996). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan berkurangnya partisipasi generasi muda dalam aktivitas budaya.

Namun demikian, aktivitas kebudayaan tetap dapat bertahan apabila didukung oleh berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Smith (2006) menekankan bahwa pelestarian budaya memerlukan kolaborasi berbagai stakeholder. Dalam konteks penelitian ini, aktivitas kebudayaan di Desa Palembang menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana kolaborasi stakeholder dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal.

Dalam mengembangkan pariwisata, masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengembangkan potensi wisata (Nugroho & Nurchayati, 2022). Di samping itu, infrastruktur dan fasilitas merupakan poin penting dalam mengembangkan pariwisata suatu wilayah (Kusumawardhani, 2020). Pelayanan publik berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus penyebab utama kegagalan dalam mengundang investor (Rahman, 2018). Keadaan ini menegaskan bahwa masyarakat dan infrastruktur menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan uraian diatas, aktivitas kebudayaan merupakan wujud nyata dari kebudayaan yang mencerminkan nilai, norma, dan identitas masyarakat. Dalam konteks Desa Palembapang, aktivitas kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, keberlangsungan aktivitas kebudayaan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat serta kolaborasi antar stakeholder.

2.5 Landasan Teori Stakeholder Edward Freeman

Konsep stakeholder pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman dalam karyanya *Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984)*. Dalam tulisannya, Freeman mengatakan bahwa “*Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization’s objectives*”. Artinya, stakeholder adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam konteks penelitian, stakeholder tidak hanya terbatas pada pihak internal, tetapi juga mencakup pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap suatu aktivitas, termasuk aktivitas kebudayaan.

Teori stakeholder menekankan bahwa organisasi atau suatu kegiatan tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jaringan hubungan dengan berbagai pihak. Freeman (1984) menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan para stakeholder. Menurut R. Edward Freeman, terdapat dua prinsip utama: *Pertama*, organisasi harus memperhatikan kepentingan semua stakeholder, bukan hanya satu pihak (misalnya pemilik atau pemerintah). *Kedua*, hubungan yang harmonis dengan stakeholder akan meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan suatu kegiatan. Dalam konteks aktivitas kebudayaan, teori ini relevan karena kegiatan budaya melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, dan generasi muda.

Konsep stakeholder yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman tidak hanya menjelaskan siapa saja pihak yang berkepentingan, tetapi juga membuka ruang untuk mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengaruhnya terhadap suatu kegiatan atau organisasi. Klasifikasi ini penting untuk memahami peran masing-masing pihak dalam mendukung keberhasilan suatu program atau aktivitas, termasuk dalam aktivitas kebudayaan.

Salah satu klasifikasi stakeholder yang paling umum digunakan adalah pembagian menjadi stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Menurut Clarkson (1995), stakeholder primer merupakan pihak yang memiliki keterlibatan langsung serta sangat menentukan keberlangsungan suatu organisasi atau kegiatan. Stakeholder primer ini umumnya mencakup pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam proses kegiatan, seperti masyarakat lokal, pemerintah desa, dan pelaku utama kegiatan.

Sebaliknya, stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap kegiatan tersebut. Stakeholder sekunder dapat berupa media, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun pihak lain yang memberikan dukungan tidak langsung. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terlibat langsung, stakeholder sekunder tetap memiliki peran dalam membentuk opini, memberikan legitimasi, serta mendukung keberlanjutan suatu kegiatan (Clarkson, 1995).

Selain klasifikasi tersebut, perkembangan teori stakeholder juga memperkenalkan pendekatan yang lebih analitis dalam mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruhnya. Salah satu model yang cukup berpengaruh dikemukakan oleh Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle, dan Donna J. Wood (1997), yang mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tiga atribut utama, yaitu *power* (kekuasaan), *legitimacy* (legitimasi), dan *urgency* (urgensi). Model ini dikenal sebagai stakeholder salience model, yang menjelaskan bahwa semakin besar kombinasi atribut

yang dimiliki oleh stakeholder, maka semakin besar pula tingkat kepentingannya dalam suatu kegiatan.

Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi stakeholder menjadi penting untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembapang. Stakeholder primer dapat meliputi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat sebagai pelaku utama budaya. Sementara itu, stakeholder sekunder dapat mencakup pihak eksternal seperti akademisi, media, dan lembaga terkait yang berperan dalam mendukung pelestarian budaya.

Berhubungan dengan klasifikasi, setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Aktivitas kebudayaan sebagai suatu proses sosial tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga berbagai pihak yang berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Peran stakeholder dalam aktivitas kebudayaan dapat dilihat dari kontribusi masing-masing pihak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kebijakan, dukungan anggaran, serta regulasi dalam pelestarian budaya. Masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama yang menjalankan dan mempertahankan praktik budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh adat memiliki peran sebagai penjaga nilai dan norma budaya, sekaligus sebagai pengarah dalam pelaksanaan tradisi. Sementara itu, pihak eksternal seperti akademisi dan media berperan dalam mendukung dokumentasi, publikasi, serta pengembangan kebudayaan (Sedyawati, 2010; Smith, 2006)

Dengan memahami klasifikasi serta peran tiap pihak dalam stakeholder, peneliti dapat menganalisis secara lebih mendalam mengenai kepentingan serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam aktivitas kebudayaan. Hal ini juga menjadi dasar dalam melihat bagaimana kolaborasi antar stakeholder dapat terbentuk dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian mengenai kolaborasi

stakeholder dalam aktivitas kebudayaan, khususnya dalam konteks masyarakat lokal seperti di Desa Palembang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kolaborasi stakeholder dalam pembangunan desa telah menjadi perhatian berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan desa tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, sumber daya, serta peran yang berbeda. Konsep kolaborasi stakeholder kemudian berkembang menjadi salah satu pendekatan penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, termasuk dalam aktivitas sosial dan kebudayaan.

Dalam penelitiannya mengenai model kolaborasi stakeholder pada pengembangan Desa Wisata Ketapanrame, Kumala dkk. (2024) mengungkapkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat dibangun melalui model pentahelix, yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Untuk memperoleh data penelitian, penulis menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh adanya komunikasi yang intensif, kejelasan pembagian peran, serta komitmen bersama antar stakeholder. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan program. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan fokus terhadap keterlibatan multi-aktor dalam kegiatan berbasis masyarakat, yang dalam konteks penelitian ini diarahkan pada aktivitas kebudayaan.

Selanjutnya, penelitian oleh Kirana (2020) yang mengkaji *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu mengungkapkan bahwa proses pembangunan desa membutuhkan sinergi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah. Penelitian ini menekankan bahwa pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor dominan, melainkan sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi bagi stakeholder lainnya, seperti sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang terbangun mampu meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata, baik dari segi perencanaan maupun implementasi program. Penelitian ini menjadi relevan karena memberikan dasar konseptual bahwa aktivitas desa, termasuk aktivitas kebudayaan, tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai stakeholder yang saling berinteraksi dalam suatu sistem kolaboratif

Penelitian lain yang dilakukan oleh Purnomo dkk. (2021) mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Borobudur menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan indikator *collaborative governance*, seperti dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama, untuk mengukur tingkat keberhasilan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepercayaan (*trust*) dan komunikasi menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa perbedaan kepentingan antar stakeholder dan keterbatasan koordinasi. Relevansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran empiris mengenai dinamika kolaborasi yang dapat dijadikan pembanding dalam menganalisis kolaborasi stakeholder pada aktivitas kebudayaan di tingkat desa.

Selain dalam konteks pariwisata, penelitian mengenai kolaborasi stakeholder juga dilakukan dalam pengelolaan sumber daya desa.

Penelitian oleh Sari (2022) mengenai tata kelola Telaga Desa Potorono menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder telah terbentuk melalui keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kolaborasi belum berjalan optimal akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal pembagian peran yang belum jelas, sehingga menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan stakeholder, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan manajemen hubungan antar aktor. Hal ini menjadi relevan dalam konteks penelitian kebudayaan, di mana interaksi sosial dan peran masing-masing stakeholder sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan budaya.

Penelitian oleh Rahmawati (2021) tentang kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa menunjukkan bahwa pembangunan desa yang berbasis partisipasi membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan inovasi desa. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan lokal dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan stakeholder. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kesamaan karakteristik aktivitas yang berbasis nilai-nilai lokal dan budaya, sehingga kolaborasi antar aktor menjadi aspek yang sangat penting.

Lebih lanjut, penelitian oleh Pratama (2023) mengenai kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Tanjung Buku menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menemukan beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kapasitas sebagian stakeholder dalam mendukung program pengembangan

desa. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada niat untuk bekerja sama, tetapi juga pada kemampuan masing-masing stakeholder dalam menjalankan perannya. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran bahwa hambatan dalam kolaborasi merupakan fenomena yang umum terjadi, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks aktivitas kebudayaan.

Penelitian lain oleh Hidayat (2022) yang mengkaji kolaborasi antara pemerintah desa dan kelompok sadar wisata menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan pembagian peran yang jelas dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan kegiatan desa. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi ditunjang oleh adanya koordinasi yang baik antar stakeholder, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas dan kebijakan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya faktor pendukung dalam kolaborasi, yang juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan aktivitas kebudayaan di desa.

Selain itu, penelitian oleh Wibowo (2021) mengenai urgensi kolaborasi stakeholder dalam pelayanan publik memberikan perspektif teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan (trust), komitmen, dan pemahaman bersama merupakan elemen kunci dalam membangun kolaborasi yang efektif. Tanpa adanya ketiga faktor tersebut, kolaborasi cenderung tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini relevan karena memberikan landasan konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi stakeholder terbentuk dan berjalan dalam aktivitas kebudayaan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi stakeholder merupakan elemen penting dalam berbagai aktivitas pembangunan desa, baik dalam konteks pariwisata, inovasi desa, pengelolaan sumber daya, maupun pelayanan publik. Sebagian besar

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, kepercayaan, koordinasi, serta kejelasan pembagian peran antar stakeholder. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Namun demikian, dari berbagai penelitian yang telah dikaji, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada kolaborasi stakeholder dalam konteks pengembangan desa wisata dan tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di tingkat desa masih sangat terbatas, terutama pada konteks lokal seperti Desa Palembapang Kabupaten Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara lebih spesifik bagaimana kolaborasi stakeholder terbentuk, dijalankan, serta tantangan yang dihadapi dalam aktivitas kebudayaan di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian mengenai kolaborasi stakeholder, khususnya dalam konteks kebudayaan lokal, serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dan stakeholder lainnya dalam mengoptimalkan kolaborasi untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya di tingkat lokal.

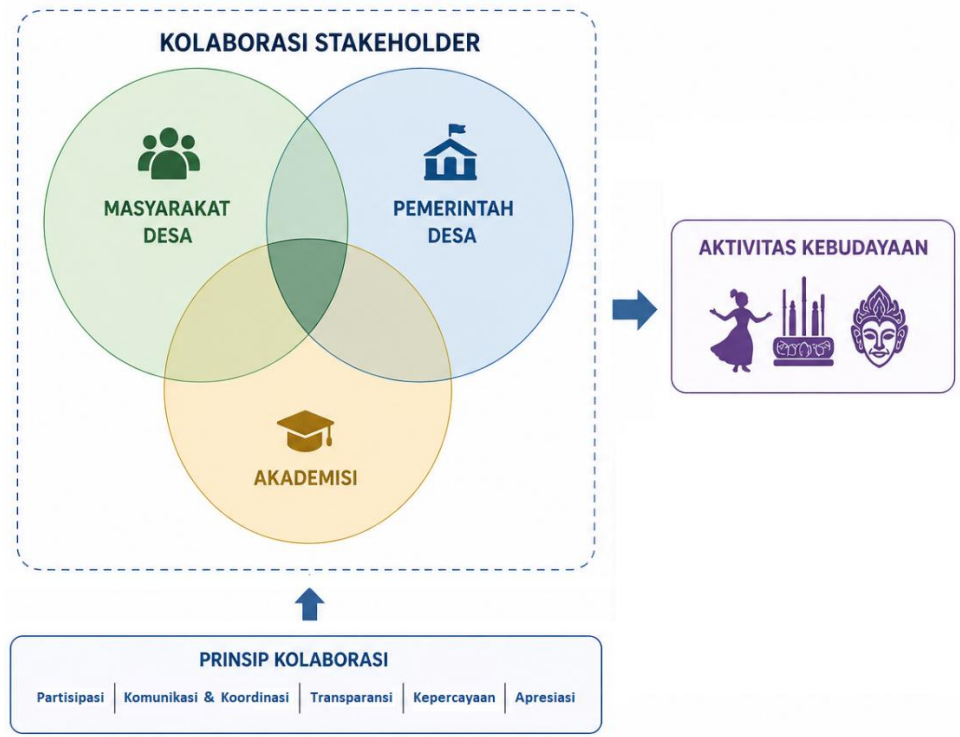
2.7 Kerangka Penelitian

Aktivitas kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas sosial masyarakat yang berfungsi untuk menjaga nilai, tradisi, serta warisan budaya lokal agar tetap berkelanjutan. Dalam konteks desa, keberlangsungan aktivitas kebudayaan tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan peran berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi sangat relevan dalam pengelolaan aktivitas kebudayaan di tingkat lokal.

Konsep kolaborasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) berakar dari pemikiran R. Edward Freeman yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kegiatan organisasi atau program publik ditentukan oleh keterlibatan seluruh pihak yang terdampak maupun yang memengaruhi proses tersebut. Dalam perkembangan kebijakan publik, konsep ini diperluas dalam bentuk *collaborative governance*, yaitu proses kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara kolektif (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks aktivitas kebudayaan di desa, kolaborasi stakeholder menjadi sangat penting karena kegiatan budaya biasanya melibatkan banyak pihak seperti pemerintah desa sebagai fasilitator, tokoh masyarakat sebagai penggerak sosial, kelompok seni sebagai pelaksana kegiatan, serta masyarakat sebagai partisipan utama. Kolaborasi ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, hingga pelestarian budaya secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kegiatan berbasis budaya sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antar stakeholder. Kolaborasi yang baik ditandai dengan adanya komunikasi yang efektif, koordinasi yang jelas, pembagian peran yang proporsional, serta komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas budaya (Sari & Wibowo, 2025). Tanpa adanya sinergi antar pihak, aktivitas kebudayaan cenderung berjalan tidak optimal dan berisiko mengalami penurunan partisipasi masyarakat.



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Kolaborasi Stakeholder dalam Aktivitas Kebudayaan

Dalam penelitian ini, kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan dipahami sebagai bentuk kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan budaya untuk mencapai tujuan bersama, melanjutkan aktivitas historis sebagai aset identitas suku dan budaya. Kolaborasi tersebut diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu partisipasi tiap stakeholder, komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, transparansi informasi, kepercayaan antar stakeholder, serta apresiasi terhadap kontribusi masing-masing stakeholder.

Indikator-indikator tersebut kemudian diukur menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan berbagai kondisi kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat, melainkan untuk memberikan gambaran

empiris mengenai bagaimana kolaborasi antar stakeholder berlangsung dalam mendukung aktivitas kebudayaan di tingkat desa.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat terukur sehingga dapat dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan fenomena yang diteliti. Pendekatan kuantitatif memungkinkan data empiris diolah secara statistik guna memverifikasi atau menyanggah suatu klaim pengetahuan (Creswell, 2013). Sementara itu, desain deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang objektif dan terstruktur mengenai fakta, kondisi, serta karakteristik populasi atau bidang kajian yang menjadi fokus penelitian. Peneliti berupaya untuk mendapatkan data yang terukur dan memetakan distribusi frekuensi untuk menggambarkan aktivitas yang telah terjadi. Data hasil kuesioner dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan teknik garis kontinum untuk mengetahui kategori penilaian responden terhadap variabel penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Senada dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan. Desa tersebut dipilih lantaran memiliki potensi budaya dan telah banyak disorot oleh media lokal dan nasional. Di samping itu, dalam ranah akademik terdapat penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan dan memperkuat informasi bahwa Desa Palembang memang memiliki potensi dan aktivitas kebudayaan. Senada dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini akan

dilaksanakan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan. Desa tersebut dipilih lantaran memiliki potensi budaya dan telah banyak disorot oleh media lokal dan nasional. Di samping itu, dalam ranah akademik terdapat penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan dan memperkuat informasi bahwa Desa Palembang memang memiliki potensi dan aktivitas kebudayaan. Desa ini berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan kode pos 35551. Desa Palembang memiliki total 25 wilayah yang terdiri dari 17 desa dan 8 kelurahan. Berdasarkan data profil desa, batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara	: Desa Sukaraja Palas
Sebelah Selatan	: Desa Babulang
Sebelah Barat	: Desa Negeri Pandan
Sebelah Timur	: Desa Kekiling

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel dengan penjabaran sebagai berikut:

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang memiliki relevansi dengan keseluruhan informasi yang ingin dicari oleh peneliti (Creswell, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat atau mengetahui aktivitas kebudayaan di Desa Palembang. Namun, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti sehingga peneliti menetapkan untuk bergantung pada metode sampling yang akan digunakan, yaitu *accidental sampling*.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel digunakan untuk mewakili karakteristik dari total keseluruhan populasi (Creswell, 2013). Teknik penentuan

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang didasarkan pada kebetulan, di mana individu yang ditemui peneliti secara langsung dapat dijadikan sampel sepanjang dianggap relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi dalam penelitian tidak diketahui secara pasti serta memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kuota sampel sebanyak 100 responden. Penentuan jumlah sampel tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan data penelitian, efektivitas pengumpulan data, serta keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti dalam menjangkau responden. Kuesioner disebarakan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penelitian hingga jumlah responden yang ditentukan terpenuhi (Sugiyono, 2019).

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui berbagai teknik pengumpulan data (Creswell, 2013). Data primer ini ialah data asli yang diperoleh peneliti untuk menunjang jalannya penelitian (Amirin, 1995). Dalam konteks penelitian ini, data primer yang digunakan ialah hasil dari teknik pengumpulan data kuesioner terhadap stakeholder seperti masyarakat desa, pemerintah desa, dan akademisi yang terlibat dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk menunjang penelitiannya (Salsabila, 2022). Pengumpulan data-data ini dilakukan oleh peneliti juga dalam rangka untuk mengeksplorasi lebih dalam terhadap kajian yang diteliti (Creswell, 2013). Data-data sekunder yang digunakan antara lain seperti buku, dokumentasi dokumen, berita, laporan, hingga studi pustaka penelitian-penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik utama pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kuesioner. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis oleh peneliti untuk kemudian diisi oleh responden (Rahmadi, 2011). Dalam konteks bentuk, peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup. Hal ini berarti, peneliti memberikan opsi jawaban sehingga para responden tidak memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban lain selain opsi yang telah disediakan.

Berbicara dalam implementasinya, peneliti menyebarkan kuesioner yang telah dibuat kepada stakeholder yang terlibat dalam upaya pengembangan wisata budaya. Penyebaran kuesioner ini dilakukan melalui media *google form* dengan disesuaikan pada metode skala *likert*. Metode ini merupakan pengukuran untuk memperoleh data kuantitatif mengenai kesetujuan opini atau persepsi responden melalui opsi jawaban yang telah disediakan peneliti (Rahmadi, 2011).

3.6 Instrumen Penelitian

Pada bagian instrumen penelitian ini akan dijelaskan pada sub bab berikut:

3.6.1 Skala *Likert*

Skala *likert* digunakan oleh peneliti untuk mengukur pemahaman atau persepsi seseorang (Sudaryono & Margono, 2013). Dalam penelitian kuantitatif, terdapat variabel yang digunakan dalam pengukuran. Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Nantinya, indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuat item-item pertanyaan (Rohmad & Sarah, 2021). Menggunakan skala *likert*, item pertanyaan hanya akan dijawab dengan sistem *ended* berupa skor persetujuan.

Keterangan	Singkatan	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Tabel 3.1 Skala Likert

3.6.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan makna dari konsep yang peneliti gunakan agar mempermudah pengaplikasian konsep dalam jalannya penelitian (Pasaribu, 2022). Definisi konseptual juga digunakan untuk menjelaskan makna dari variabel penelitian secara konstitutif. Pada penelitian ini, terdapat variabel tunggal yaitu kolaborasi stakeholder.

Variabel tersebut dapat didefinisikan menjadi 5 dimensi yang sesuai dengan model kolaborasi stakeholder, khususnya terkait dengan aktivitas kebudayaan. Berikut penjabarannya secara konseptual dalam konteks aktivitas kebudayaan:

a. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan individu atau kelompok secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, maupun evaluasi suatu kegiatan atau program guna mencapai tujuan bersama. Partisipasi menunjukkan adanya kontribusi pemikiran, tenaga, sumber daya, maupun dukungan dari para pihak yang terlibat.

b. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pemahaman antar pihak yang terlibat serta upaya penyelarasan tindakan, peran, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komunikasi berfungsi menciptakan pemahaman bersama, sedangkan koordinasi memastikan setiap pihak bekerja secara terintegrasi.

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam menyediakan, menyampaikan, dan mengakses informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan sehingga proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan sumber daya dapat diketahui, dipahami, dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

d. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap integritas, kompetensi, konsistensi, dan itikad baik pihak lain sehingga mendorong terjalinnya hubungan kerja sama yang positif, saling mendukung, dan berkelanjutan.

e. Apresiasi

Apresiasi adalah bentuk pengakuan, penghargaan, atau penilaian positif yang diberikan kepada individu maupun kelompok atas kontribusi, partisipasi, prestasi, atau peran yang telah diberikan dalam suatu kegiatan atau kerja sama. Apresiasi dapat meningkatkan motivasi, komitmen, dan rasa memiliki terhadap tujuan bersama.

3.6.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan khusus yang disusun oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Dengan demikian, definisi operasional berbeda dengan definisi konseptual yang umumnya didasarkan pada landasan teori tertentu (Pasaribu, 2022). Definisi operasional dibuat untuk menentukan apa saja alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan menjabarkan terkait definisi operasional masing-masing variabel dan indikator sebagai alat ukur melalui tabel sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No
Kolaborasi Stakeholder	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam perencanaan 2. Kehadiran <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan 3. Peluang <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi 4. Kontribusi aktif <i>stakeholder</i> berupa tenaga, pikiran atau sumber daya 	Likert	1 - 9
	Komunikasi & Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas komunikasi antar <i>stakeholder</i> 2. Efektivitas penyampaian informasi terkait 	Likert	10 - 15

		<ul style="list-style-type: none"> kegiatan 3. Keteraturan koordinasi sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan 4. Efektivitas penggunaan media komunikasi (whatsapp dll) 		
	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan kegiatan 2. Keterbukaan penggunaan sumber daya dalam kegiatan 3. Tidak adanya penyembunyian informasi antar <i>stakeholder</i> 	Likert	16 - 18
	Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keyakinan terhadap kemampuan <i>stakeholder</i> lain 2. Sikap saling menghormati antar <i>stakeholder</i> 3. Tingkat kecurigaan negatif dalam kerjasama 	Likert	19 - 21
	Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan terhadap kontribusi masing-masing <i>stakeholder</i> 2. Sikap saling apresiasi antar <i>stakeholder</i> 3. Tidak adanya rasa diabaikan dalam kegiatan maupun perencanaan 	Likert	22 - 24

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Indikator Penelitian

3.7 Teknik Keabsahan Data

Sebelum masuk ke tahapan analisis data, instrumen penelitian harus diukur terlebih dahulu dengan teknik keabsahan data. Bagian ini bertujuan untuk mengkroscek apakah alat ukur penelitian betul-betul mengukur apa yang

harusnya diukur. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.7.1 Uji Validitas

Teknik ini merupakan uji coba pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sampel mengerti akan pertanyaan yang diberikan. Apabila hasil tidak valid, maka ada kemungkinan sampel tidak memahami pertanyaan yang peneliti ajukan (Sahir, 2022). Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas konstruk melalui Microsoft Excel dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Gambar 3.1 Rumus Uji Validitas
Sumber: Sahir (2022)

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- n = jumlah responden
- X = skor tiap item pertanyaan
- Y = skor total variabel
- XY = hasil perkalian X dan Y
- X² = kuadrat X
- Y² = kuadrat Y

Menggunakan rumus di atas, peneliti menggunakan prosedur pengujian:

1. Jika r positif serta $r \geq 0,3$ maka item pertanyaan valid
2. Jika r tidak positif serta $r \leq 0,3$ maka item pertanyaan tidak valid

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kekonsistenan jawaban dari sampel peneliti. Realibilitas dinyatakan melalui angka sebagai koefisien, apabila koefisien tinggi maka reliabilitas juga tinggi (Sahir, 2022). Peneliti melakukan uji reliabilitas melalui uji Cronbach Alpha dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \times \left\{ 1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right\}$$

Gambar 3.2 Rumus Uji Reliabilitas
Sumber: Sahir (2022)

Keterangan:

- R_{11} = Nilai reliabilitas
 K = Jumlah item
 $\sum S_i$ = Jumlah varian skor tiap item
 S_t = Jumlah varian total

Menggunakan rumus di atas, peneliti menggunakan prosedur pengujian:

Interval koefisien	Interpretasi
0,800-1,00	Sangat tinggi
0,600-0,800	Tinggi
0,400-0,600	Cukup
0,200-0,400	Rendah
0,00-0,200	Sangat rendah

Sumber: Sahir (2022)

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

3.8.2 Statistik deskriptif merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data yang telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi terhadap populasi secara keseluruhan (Sahir, 2022). Dalam analisis ini, peneliti akan mendeskripsikan data dari sampel penelitian yang digunakan, meliputi sampel berdasarkan gender, usia dan pendidikan terakhirnya.

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner akan diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, hasil skor kuesioner diinterpretasikan menggunakan teknik garis kontinum untuk mengetahui kategori penilaian responden terhadap variabel penelitian, seperti sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Teknik garis kontinum digunakan untuk mempermudah interpretasi skor berdasarkan interval tertentu.

Setelah data yang menjawab rumusan masalah terkumpul, terdapat sejumlah tahapan pengolahan data yang perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto. (2010) sebagai berikut :

1. Editing data, yaitu tahap pemeriksaan terhadap angket atau instrumen penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai, lengkap, dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.
2. Coding data, yaitu proses pemberian kode atau perubahan data ke dalam bentuk angka untuk memudahkan analisis, khususnya dengan menggunakan skala Likert. Dalam skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang kemudian disusun dalam bentuk butir pertanyaan pada instrumen penelitian. Setiap jawaban pada

tiap item variabel kemudian diberikan skor tertentu sesuai dengan ketentuan skala Likert.

Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
Setuju	4	Setuju	2
Netral	3	Netral	3
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

3. Tabulating data, yaitu proses menyusun data hasil kuesioner ke dalam bentuk angka yang kemudian dihitung berdasarkan skala Likert. Tahap ini dilakukan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap responden dan menyajikannya dalam bentuk tabel rekapitulasi secara sistematis dan lengkap. Adapun contoh tabel rekapitulasi pengolahan data disajikan sebagai berikut:
4. Garis Kontinuum, peneliti membuat garis kontinuum setelah setiap indikator memiliki jumlah. Penelitian ini membahas setiap sub-variabel yang di dalamnya terdapat berbeda-beda jumlah indikatornya. Sebelum itu, jenjang interval harus ditentukan dengan menggunakan rumus yang diusulkan oleh Sudjana (2005), yang dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Jarak interval} = \frac{(\text{nilai maksimum-nilai minimum})}{\text{jumlah kriteria pertanyaan}}$$

Rumus di atas duntuk menentukan interval dari jawaban sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat setuju dari suatu variabel. Berikut langkah-langkah membuat garis kontinuum:

1. Menentukan jumlah skor kriterium (SK) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor kriterium maksimum} = ST \times JB \times JR$$

$$\text{Skor Kriterium Minimum} = SR \times JB \times JR$$

Keterangan:

ST : skor tertinggi

SR : skor terendah

JB : jumlah butir

JR : jumlah responden

2. Membuat daerah kategori kontinum.

Daerah kategori kontinum dibagi menjadi lima tingkatan, contohnya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Selanjutnya, hitung selisih skor kontinum dari setiap tingkatan dengan rumus :

$$R = \frac{\text{skor kontinum tertinggi} - \text{skor kontinum terendah}}{5}$$

Kemudian menentukan daerah kontinum tinggi, sedang dan rendah dengan cara menambahkan selisih (R) dari mulai kontinum tinggi sampai rendah.

3. Menentukan garis kontinum dan menentukan daerah letak skor untuk variabel Kolaborasi Stakeholder.

Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
-------------------------	---------------	---------------	------	----------------

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Palembang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, gotong royong, dan kehidupan sosial berbasis budaya lokal. Secara sosial, masyarakat Desa Palembang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang hidup berdampingan dan masih mempertahankan tradisi budaya Lampung dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai wilayah yang memiliki identitas budaya yang cukup kuat, Desa Palembang dikenal aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan kebudayaan dan pelestarian adat istiadat daerah. Berdasarkan beberapa pemberitaan media dan kajian budaya, masyarakat Desa Palembang masih mempertahankan berbagai bentuk kesenian tradisional Lampung seperti tari Bedana, musik gambus tunggal, pencak silat tradisional, hingga pertunjukan budaya *tupping* atau topeng adat khas Lampung Selatan. (Bongkarselatan.com, 2022). Kesenian *tupping* merupakan salah satu bentuk budaya tradisional yang juga dikenal dan berkembang di wilayah Lampung Selatan, termasuk di lingkungan masyarakat Desa Palembang. *Tupping* adalah kesenian topeng tradisional khas masyarakat adat Lampung yang biasanya ditampilkan dalam kegiatan adat, perayaan budaya, maupun acara hiburan rakyat. Dalam pertunjukannya, para pemain menggunakan topeng dengan berbagai karakter dan ekspresi yang memiliki makna simbolis tertentu. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lampung yang diwariskan secara turun-temurun.

Di Desa Palembang, kesenian tuppeting menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya lokal yang masih diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pertunjukan tuppeting umumnya ditampilkan bersamaan dengan kegiatan budaya desa seperti festival budaya, peringatan hari besar, dan kegiatan adat masyarakat. Keberadaan kesenian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Palembang masih memiliki kesadaran untuk mempertahankan warisan budaya daerah di tengah perkembangan modernisasi.

Selain itu, Desa Palembang juga memiliki sanggar seni yang menjadi wadah pengembangan aktivitas budaya masyarakat, yaitu Sanggar Sai Buway. Sanggar tersebut aktif dalam kegiatan pelestarian budaya seperti pertunjukan tari daerah Lampung, musik tradisional, gitar tunggal, gambus, dan pencak silat. Keberadaan sanggar seni tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Palembang masih memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. (Tivantara, Purboyo, Junaidi, Alamsyah, & Hermawan, 2025)

Upaya pelestarian budaya di Desa Palembang juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Dewan Kesenian Lampung dan pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai pelestarian sastra dan budaya lokal yang diselenggarakan di Desa Palembang dengan melibatkan unsur seni, masyarakat, serta pemerintah daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal sekaligus mendorong generasi muda untuk mencintai budaya daerahnya. (Lampungselatankab.go.id, 2024)

Dalam konteks penelitian mengenai “Kolaborasi Stakeholder dalam Aktivitas Kebudayaan”, Desa Palembang menjadi lokasi penelitian yang relevan karena aktivitas kebudayaan yang ada tidak terlepas dari keterlibatan berbagai stakeholder. Pemerintah desa, tokoh adat, kelompok seni, organisasi kepemudaan, komunitas budaya, serta masyarakat umum memiliki peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan kegiatan budaya. Bentuk kolaborasi tersebut terlihat melalui koordinasi, partisipasi

masyarakat, dukungan pemerintah, serta kerja sama antarlembaga dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.

Kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang menjadi penting karena mampu mendukung keberlangsungan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas sosial masyarakat desa. Melalui kerja sama yang baik antar pihak, kegiatan kebudayaan tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya, pendidikan sosial, dan penguatan nilai kebersamaan di lingkungan masyarakat Desa Palembang.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan akademisi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh seluruh dimensi kolaborasi yang memperoleh kategori baik hingga sangat baik.

1. **Partisipasi** memperoleh kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa stakeholder memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan aktivitas kebudayaan di Desa Palembang. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pelestarian budaya lokal.
2. **Komunikasi dan koordinasi** memperoleh kategori baik. Stakeholder telah menjalin komunikasi yang cukup efektif dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan kegiatan budaya, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan intensitas koordinasi agar lebih optimal.
3. **Transparansi** memperoleh kategori baik. Keterbukaan informasi terkait kegiatan budaya dan pengelolaan sumber daya telah diterapkan dengan cukup baik sehingga mendukung terciptanya hubungan kerja sama yang positif antar stakeholder.
4. **Kepercayaan** memperoleh kategori baik. Stakeholder menunjukkan adanya sikap saling percaya, saling menghormati, dan keyakinan terhadap kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan perannya dalam aktivitas kebudayaan.

5. **Apresiasi** memperoleh kategori baik. Antar stakeholder telah menunjukkan sikap saling menghargai dan mengakui kontribusi masing-masing pihak sehingga mampu mendorong keberlanjutan kerja sama dalam aktivitas kebudayaan.

Secara keseluruhan, kolaborasi stakeholder dalam aktivitas kebudayaan di Desa Palembang telah terlaksana dengan baik dan mendukung upaya pelestarian budaya lokal. Temuan ini memperkuat teori stakeholder yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh keterlibatan dan sinergi seluruh pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Palembang

Pemerintah desa diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder melalui forum atau pertemuan rutin yang membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas kebudayaan. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan dukungan berupa fasilitasi program, promosi kegiatan budaya, dan penyediaan sarana pendukung untuk keberlanjutan aktivitas kebudayaan.

2. Bagi Masyarakat Desa Palembang

Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan tingkat partisipasi yang telah baik serta meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam berbagai aktivitas kebudayaan. Keterlibatan generasi muda penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

3. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat terus memberikan pendampingan, edukasi, dan kontribusi keilmuan dalam pengembangan aktivitas kebudayaan.

Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, maupun dokumentasi budaya yang dapat mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

4. Bagi Seluruh Stakeholder

Seluruh stakeholder perlu meningkatkan aspek transparansi, kepercayaan, dan apresiasi melalui mekanisme komunikasi yang lebih terbuka. Dengan demikian, hubungan kolaboratif yang telah terbangun dapat semakin kuat dan berkelanjutan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian kolaborasi stakeholder dengan melibatkan lebih banyak stakeholder, seperti pelaku usaha, komunitas budaya, maupun pemerintah daerah. Selain itu, penelitian dapat menambahkan analisa pengaruh ataupun hubungan dengan variabel terkait. Penelitian juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi dalam aktivitas kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2024). Urgensi Kolaborasi Stakeholder dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*.
- Abdullah, K. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Achmad, M. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Amirin, T. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andriyani, A. A., & Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Ansell, & Gash. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arifin. (2017). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang*. Bintang: Universitas Maritim Raja Ali Haji: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Astiana, R., & Kemala, Z. (2023). Pendampingan Tata Kelola Destinasi Wisata di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. *Jurnal Bermasyarakat at*, 4(1), 28-38.
- Bongkarselatan.com. (2022, Mei). *Meriah...!! "Niyuh Syawal" Di Desa Palembang Tampilkan Seni Budaya Kearifan Lokal*.
- Bryson, J. (2008). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Choirunnisa, K., & Rahman. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Studi Kasus; Kawasan Pecinan Lasem, Kampung Lawas Maspati, Desa Selumbang. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 1-10.
- Clarkson. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92-117.
- Creswell, J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications.
- Desky, A. F. (2022). *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Medan: Buku Diklat.
- Destiana, R. K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 132-153.
- Dewi, & Fandelin, B. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117-226.
- Djamaludin. (2017). Kolaborasi Multi Stakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Uang (Studi Kasus di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang).
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Effendy, K. (2010). *Penguatan Pemerintahan Desa*. Bandung: Indra Prahasta.
- Epriliano, Febriyan, D., Pradana, G. W., Megawati, S., Febriyanti, E., Shobirin, D. R., et al. (2023). Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Budaya Lokal di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. *Communnity Development Journal*, 4(3), 6295-6302.
- Halibas, & Sibayan, M. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An hei perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 1(1), 1-10.
- Hamni, A. G., & Ulya, R. (2022). Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kerajinan Aksesoris Berbahan Batok Kelapa Sebagai Produk Unggulan Desa Palembang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu*, 4(1), 6-12.
- Hidayat. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 14-45.

- Hudiyanto, & Lutfi. (2021). Sosialisasi Konsep Manajemen Sumberdaya Budaya Pada Masyarakat Desa Hutan Sebagai Upaya Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Penanggungan. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 4(1), 1-8.
- Husein. (2021). Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 187-202.
- IDN Times. (2021, September 23). *Cerita Unik Si Bolang Desa Palembang Bertemu Bupati Lampung Selatan*. Dipetik September 27, 2024, dari IDN Times: <https://lampung.idntimes.com/life/inspiration/martin-tobing-1/cerita-unik-si-bolang-desa-palembapang-bertemu-bupati-lampung-selatan>
- Jamalludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kedasi Silayar, I. S., & Mulyati, D. (2021). Tata Kelola Pemerintah Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 859-874.
- Kusumawardhani. (2020). Kajian 14 Pillar Pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Sebagai Indikator Daya Saing Pariwisata Suatu Negara. *Tourism Scientific Journal*, 6(1), 79-95.
- Lampung Post. (2023, November 15). *HMJ Sosiologi Unila Sukses Gelar Festival Budaya di Desa Palembang*. Dipetik September 27, 2024, dari Lampung Post: <https://lampost.co/pendidikan/hmj-sosiologi-unila-sukses-gelar-festival-budaya-di-desa-palembapang/>
- Lampungselatankab.go.id. (2024). *Upaya Lestarikan Sastra dan Warna Lokal, Dewan Kesenian Lampung Bakal Gelar FGD di Desa Palembang*.
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55-63.
- Murdiyanto. (2008). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Wimaya Press UPN "Veteran".
- Murniati, D. E. (2009). Peran Perguruan Tinggi Dalam Triple Helix Sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif. *Seminar Nasional "Peran Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan Industri Kreatif"* (hal. 1-7). Yogyakarta: Jurusan PTBB FT UNY.
- Musleh, & Lubis. (2024). Model Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Berbasis Pentahelix. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*.

- Nasrin, Ismainar, H., Putra, S., Suhartono, R. M., Nurhuda, D. Y., Suanto, et al. (2023). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nugroho, S. S., & Nurchayati, Z. N. (2022). *Komodifikasi Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Kearifan Lokal*. Klaten: Lakeisha.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Oroh, G. S. (2014). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 1(1), 1-26.
- Pasaribu, B. (2022). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka.
- Patton, D. C., & Jennifer. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Routledge.
- Priyanto. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya (Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1), 76-84.
- Putra, P. G., Kurniansah, R., Budiatiningsih, M., Istianingsih, N., Susila, I. M., Suteja, W., et al. (2022). *Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Pariwisata*. Bali: CV Intelektual Manifes Media.
- Radar Lamsel. (2019, Maret 11). *Seniman Sanggar Seni Sai Buay Tampil*. Dipetik September 27, 2024, dari Radar Lamsel: https://radarlamsel.disway.id/read/11669/seniman-sanggar-seni-sai-buay-tampil#google_vignette
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahman. (2018). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(55), 1-10.
- Rahman, N., & Prakoso, E. (2012). Perspektif Stakeholders Terhadap Potensi Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1), 1-9.
- Rahmatillah, T. P., & Hirsan, F. P. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 111-116.
- Rahyunir Rauf, S. M. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

- Rohmad, & Sarah, S. (2021). *Pengembangan Instrumen Angket*. Yogyakarta: K. Media.
- Sabaruddin. (2015). Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. *Graha Ilmu*.
- Sadad, Abdul, Tua, Harapan, Meilani, N., Meiwanda, G., et al. (2023). Kolaborasi Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Menuju Desa Wisata Kategori Maju di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis. *Communnity Development Journal*, 4(4), 7548-7553.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sahyana, Y. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(18), 157-181.
- Salsabila. (2022, April 5). *Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*. Dipetik Oktober 14, 2022, dari dqlab.id: <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>
- Sapto, N. S., & Mutmainah. (2020). *Desain Politik Hukum Pariwisata Berbasis Kesejahteraan*. Klaten: Lakeisha.
- Sari, & Wibowo. (2025). Collaborative governance dalam pengembangan kegiatan budaya desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Sedyawati. (2010). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. RajaGrafindo Persada.
- Siagian, S. (1974). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simanjuntak, & Tanjung, N. (2017). *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinulingga, Samerdanta, Meutia, A., Zahra, Y., Lubis, A. P., Nasution, S., et al. (2022). Pemberdayaan Sanggar Budaya Lokal dalam Mendukung Desa Wisata di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(6), 449-456.
- Slovin. (1960). *Sampling*. New York: Simon Schuster Inc.
- Smith. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.

- Solichah, & Merita, R. S. (2023). Peran Akademisi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 104-125.
- Sudaryono, & Margono, R. (2013). *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyarto, & Amaruli. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45-52.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, & Fajar. (2018, Maret 2). Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Memperkuat Kemandirian Desa. *Artikel Ilmiah*.
- Syahrial. (2022). Diversifikasi Budaya Tuping Sebagai Identitas Masyarakat Lampung Peminggir. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 4(2), 260-265.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata. *Jurnal Publika*, 10(2), 17-30.
- Syarifa, & Wijaya. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang). *Journal of Education, Society and Culture*, 8(1), 515-531.
- Talib, D. (2020). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Jurnal Tulisan Ilmiah Pariwisata*, 3(1), 12-18.
- Tivantara, B. J., Purboyo, P. M., Junaidi, J., Alamsyah, & Hermawan, T. (2025). Komodifikasi Topping: Pelestarian Kebudayaan. *Nengah Nyappur, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ulumiyah. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 90-99.
- Widyaningsih, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Sosial Budaya di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 68-71.

Wirawan, P. E., & Semara, M. T. (2021). *Pengantar Pariwisata*. Bogor: IPB International Press.

Yahya, A. A., & Eka, R. (2022). Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 98-108.